

**EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 30 KE PSAK NO. 73 TENTANG
SEWA ASET TETAP PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG SAM RATULANGI MANADO**

*THE EVALUATION OF THE APPLICATION OF PSAK. NO. 30 TO PSAK NO. 73 REGARDING
LEASE OF FIXED ASSETS AT PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BRANCH
OF SAM RATULANGI MANADO*

Oleh:

**Jonathan Karlo Boyoh¹
Jullie J. Sondakh²
Sintje Rondonuwu³**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹jonathan23karlo@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³sinc.csc@gmail.com

Abstrak: Mulai 1 Januari 2020 PSAK No. 73 Sewa berlaku, menggantikan PSAK No. 30 Sewa. PSAK No. 30 mengalami banyak perubahan terutama dari sisi penyewa. Berdasarkan PSAK No. 73, penyewa tidak akan lagi mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Penyewa diminta untuk mengkapitalisasi semua sewa yang mereka miliki, kecuali untuk sewa jangka pendek atau sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Adanya perubahan ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK No. 30 dan melihat dampak penerapan PSAK No. 73 tentang sewa aset tetap terhadap laporan keuangan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi sewa aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 30. Selanjutnya dengan menerapkan PSAK No. 73, akan mengalami peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pada laporan posisi keuangan yang otomatis akan menimbulkan beban bunga dan beban penyusutan pada laporan laba rugi perusahaan.

Kata kunci: sewa, aset tetap, sewa pembiayaan, psak no. 30, psak no. 73

Abstract: Starting January 1, 2020 PSAK No. 73 Replacement lease, replacing PSAK No. 30 Rent. PSAK No. 30 has undergone many changes, especially from the tenant side. Based on PSAK No. 73, the lessee will no longer classify the lease as an operating lease or finance lease. Tenants serve to capitalize all leases they have, except for short-term leases or leases with low value underlying assets. Changes in these changes will affect the company's financial statements. This study aims to apply PSAK No. 30 and the impact of the application of PSAK No. 73 regarding leases of fixed assets against the financial statements of PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado branch. This research uses descriptive qualitative method, where data is done by interview and documentation. The results showed that the accounting treatment for fixed asset leases applied by the company in general was in accordance with PSAK No. 30. Furthermore, by applying PSAK No. 73, will experience an increase in the value of assets and liabilities in the financial statements which will automatically load interest expense and depreciation expense in the company's income statement.

Keywords: leases, fixed assets, financial leases, psak no. 30, psak no. 73

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini setiap bidang industri berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya terhadap aktivitas mendasar atau kehidupan masyarakat umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini justru semakin mempermudah manusia dalam hal ini masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian halnya dengan transportasi, yang semakin mudah bagi seseorang untuk mengakses dan berpindah-pindah tempat tidak hanya dalam satu wilayah melainkan antar kepulauan. Mobilisasi antar kepulauan tentu membutuhkan transportasi yang tidak hanya bisa berjalan via darat. dalam hal ini kapal via laut dan pesawat via udara. Namun harus dipertimbangkan bahwa perjalanan via laut membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu transportasi via udara yakni pesawat terbang menjadi pilihan utama meskipun dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini membuka peluang besar bagi transportasi udara untuk semakin mengembangkan industrinya. Industri penerbangan tidak akan berjalan lancar tanpa ada perusahaan yang mengelolanya. Maka jasa kebandarudaraan dibutuhkan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis Bandar udara di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pangkerego (2015) mengatakan bahwa perlu di ingat bahwa ketika melakukan kegiatan sewa, setiap perusahaan wajib mengikuti aturan dan standar yang berlaku agar supaya penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat dan riil. Perlakuan akuntansi dalam hal pencatatan dan pelaporan dari sewa tergantung pada jenis sewa yang digunakan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa setiap negara mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan, tergantung dari bagaimana kondisi, keadaan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku secara internasional. Pengelolaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan yang baik tentu harus mengikuti setiap aturan yang berlaku.

Akuntansi sewa diatur dalam PSAK No. 30: Sewa, yang merupakan hasil adopsi dari *International Accounting Standards (IAS) 17 Leases*. PSAK No. 30 yang berlaku efektif per 1 Januari 2012 mengatur bahwa *lessee* mengklasifikasi sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Namun pada tanggal 13 Januari 2016, *International Accounting Standards Board (IASB)* telah menerbitkan *International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 Leases* yang akan menggantikan (IAS) 17 dan standar pengaturan terkait sewa lainnya. Hal ini ditindaklanjuti dengan penerbitan PSAK No. 73 yang diadopsi dari (IFRS) 16 *Leases* yang memberikan dampak terhadap perubahan pelaporan keuangan karena pengaturan dalam PSAK No. 73 mengubah secara substansial perlakuan akuntansi atas sewa dan mengharuskan *lessee* untuk mencatat kontrak sewa dalam model tunggal sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan.

PSAK No. 73 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tahun 2017, efektif 1 Januari 2020 mengharuskan bahwa perusahaan diwajibkan menggunakan *financial lease* (Irwanto, 2019). Adanya perubahan ini akan berpengaruh dalam laporan keuangan suatu perusahaan terutama oleh pihak *lessee*. PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado sebagai pihak *lessee* tentu harus mengikuti aturan PSAK yang baru ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul "*Evaluasi Penerapan PSAK No. 30 Ke PSAK. No. 73 Tentang Sewa Aset Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado*".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK No. 30 dan Melihat Dampak Penerapan PSAK No. 73 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan

Menurut Giri (2017:4), akuntansi keuangan adalah suatu proses dimana berujung pada penyajian dan mengkomunikasikan laporan keuangan suatu organisasi atau entitas dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi baik eksternal maupun internal. Akuntansi dapat juga dilihat berdasarkan tiga sudut pandang,

yaitu sebagai kegiatan jasa, bidang studi dan proses. Akuntansi sebagai penyedia informasi baik informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif tentang berbagai jenis usaha ekonomi terutama yang bersifat keuangan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dilihat melalui sudut pandang akuntansi sebagai kegiatan jasa.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Hery 2017:138).

Macam-macam rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Solvabilitas
2. Rasio Profitabilitas
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Likuiditas

Aset Tetap

Lubis (2017:29) menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan perusahaan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan mempunyai masa manfaat yang mempunyai nilai susut (penurunan nilai guna). Aset tetap merupakan harta atau kekayaan yang diperoleh perusahaan melalui sebuah kegiatan ekonomi yang disebut investasi. Aset tetap pada dasarnya memiliki jangka waktu dan nilai guna untuk dipakai. Aset tetap adalah aktiva yang memiliki wujud fisik, yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun demi kelancaran operasional perusahaan, yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali serta nilainya cukup besar.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:231) suatu aset dapat dikelompokkan sebagai aset tetap apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berwujud (*tangible asset*)
Aset berupa barang yang memiliki wujud, bukan sesuatu yang tidak memiliki wujud seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.
2. Umurnya lebih dari satu tahun (*age more than one year*)
Aset dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Bukan termasuk jenis aset lainnya seperti perlengkapan yang masa operasinya kurang dari atau hanya satu tahun. Umur suatu aset yang dimaksud adalah manfaat ekonomi, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu suatu aset dapat dipergunakan secara ekonomi oleh perusahaan.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan (*used in the company's operations*)
Aset dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Apabila perusahaan memiliki aset tetap tetapi rusak atau tidak dapat diperbaiki, maka aset tetap tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap.
4. Tidak diperjualbelikan (*not for sale*)
Jika suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan umurnya lebih dari satu tahun namun dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali, maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap melainkan persediaan atau properti investasi.
5. Material (*material*)
Suatu aset tetap memiliki nilai atau harga yang relatif besar. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri mengenai kriteria materialitas tersebut.
6. Dimiliki perusahaan (*owned by company*)
Suatu aset yang bernilai tinggi, dipergunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, merupakan aset tetap jika aset tersebut secara legal merupakan aset milik perusahaan.

Sewa

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam PSAK No. 30 paragraf 04 menyatakan bahwa sewa adalah perjanjian kontraktual dimana pihak *lessor* memberikan hak kepada pihak *lessee* dalam memakai barang modal dengan jangka waktu yang ditentukan. Untuk imbalannya, *lessee* melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

Sewa diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Operating Lease* (Sewa Biasa)
2. *Capital Lease* (Sewa Pembiayaan)
3. *Sale-type Lease* (Sewa Penjualan)
4. *Leverage Lease* (Sewa Berbagi)

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan yang berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan hingga menyajikan laporan keuangan.

SAK yang sekarang berlaku di Indonesia telah terkonvergensi dengan *IFRS* (*International Financing Reporting Standards*). *IFRS* merupakan bagian akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan. Indonesia dapat mengadopsi *IFRS* karena menjadi bagian dari *IFAC* (*International Federation of Accountants*) yang telah mematuhi *SMO* (*Statement membership Obligation*) yang menjadikan *IFRS* sebagai standar akuntansi Internasional.

Perlakuan Akuntansi Sewa Pembiayaan dan Sewa Operasi Menurut PSAK No. 30

1. Perlakuan Akuntansi Sewa Pembiayaan Oleh *Lessee*
 - a. Transaksi sewa guna usaha dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa pembayaran sewa dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban *lessor*.
 - b. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.
 - c. Aktiva yang disewagunakannya harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
 - d. Kalau aktiva yang disewagunakannya dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan.
 - e. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
 - f. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and lease back*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa guna usaha apabila *leaseback* merupakan *capital lease* atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila *leaseback* merupakan *operating lease*.
2. Perlakuan Akuntansi Sewa Operasi Oleh *Lessee*

Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

Perlakuan Akuntansi Sewa Pembiayaan Menurut PSAK No. 73

Dalam PSAK No. 73 atas Sewa ini, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas akibat adanya sewa operasi sehingga tidak memenuhi kebutuhan para pembaca laporan keuangan. Oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 73 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa khususnya bagi penyewa dengan hanya memperbolehkan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan tetapi bagi pesewa tidak ada perubahan aturan apapun.

1. Perlakuan Akuntansi Sewa Pembiayaan Oleh *Lessee*
 - a. Pengakuan: Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.
 - b. Pengukuran Awal Liabilitas Sewa: Pada awal masa sewa, pihak penyewa mengakui sewa pembiayaan sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pengakuan ini dilakukan atas dasar nilai wajar aset yang disewa atau jika

lebih rendah, atas dasar nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran sewa guna minimum (*minimum lease payments*). Dalam PSAK 73 disebutkan bahwa penyewa diharuskan mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Tetapi terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yaitu untuk sewa jangka-pendek kurang dari 12 bulan dan sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

- c. Penyajian: Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya. Dan penyewa harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Aset hak-guna disajikan secara terpisah dari aset lainnya.
- d. Pengungkapan : Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kasmir (2016:7) laporan keuangan merupakan informasi data keuangan sebuah perusahaan atau instansi pada suatu periode. Dalam PSAK No. 1 dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti ini dilaksanakan pada PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Jl. AA Maramis, Lapangan, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2020 – Juli 2020.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang akan digunakan adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado tahun 2019. Sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah dalam bentuk sejarah perusahaan, struktur organisasi, kontrak/surat perjanjian sewa dan SOP dari PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai sewa aset tetap ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri dapat berupa hasil pengujian, dokumen, observasi atas keadaan atau kejadian secara fisik, juga dapat berupa objek dalam hal ini seseorang atau sekelompok orang. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori-teori akuntansi keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung tempat penelitian kemudian melakukan serangkaian proses tanya jawab dengan memberikan pertanyaan - pertanyaan secara lisan terkait sewa, penerapan PSAK No. 30, dan PSAK No. 73 kepada beberapa karyawan perusahaan. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung laporan keuangan, dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado.

Metode dan Proses Analisis

Berikut ini langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data agar menghasilkan informasi yang jelas dan akurat:

1. Peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara mengenai bagaimana penerapan PSAK No. 30 pada

- PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado. Selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui proses dokumentasi berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dokumen-dokumen pendukung terkait dengan sewa, catatan jurnal akuntansi sewa, buku PSAK No. 30 dan PSAK No. 73, Struktur organisasi, Visi dan Misi PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado, serta tugas dan fungsi PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado.
- Peneliti melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan hasil data wawancara dan dokumentasi terkait pencatatan sewa aset tetap pada PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado. Dalam wawancara peneliti menanyakan bagaimana penerapan PSAK No. 30 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado kemudian peneliti melihat dampak penerapan PSAK No. 73 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado.
 - Peneliti melakukan pengolahan data terkait penerapan akuntansi sewa aset tetap berdasarkan PSAK No. 30 dan mengevaluasinya selanjutnya melihat dampak ketika PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado menerapkan PSAK No. 73 terkait sewa aset tetap.
 - Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran terkait pengakuan sewa aset tetap berdasarkan PSAK No. 30 dan PSAK No. 73.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Bandar Udara Sam Ratulangi pada mulanya di bangun oleh jepang pada Tahun 1942 dengan panjang 700 meter, lebar 23 meter dan diberi nama Lapangan terbang mapanget. Pembangunan fasilitas Bandar Udara Sam Ratulangi ini dilaksanakan oleh FBUPK yang hasilnya mulai di operasikan sejak akhir tahun 2000 dan selanjutnya diserahkan terimakan secara operasional dari Direktorat Jenderal Penerbangan Udara ke PT. Angkasa Pura I (Persero) mulai tanggal 18 desember 2003.

PT. Angkasa Pura I (Persero) awalnya didirikan tanggal 20 Februari 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tanggal 15 November 1962 dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura "Kemayoran". Yang selanjutnya disebut PN.Kemayoran. Bandar Udara Kemayoran merupakan cikal bakal Perum Angkasa Pura I. Perubahan Perum menjadi PT. Angkasa Pura I (Persero) sesuai PPN No.5 Tahun 1992 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Angkasa Pura menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki 3 tugas pokok yaitu: menyelenggarakan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, kenyamanan dan kemudahan.

PT Angkasa Pura I (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilindungi Departemen Perhubungan yang selalu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara melalui pengusahaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan.

Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Sewa Aset Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (Persero)

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola jasa kebandarudaraan. Perusahaan ini memiliki 5 (lima) anak perusahaan dalam meningkatkan *Quality Service* pengelolaan Bandar udara yang modern, salah satunya PT Angkasa Pura *Support*. PT Angkasa Pura *Support* bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa baik secara umum maupun secara khusus, terutama kepada perusahaan induk.

Dalam melakukan sewa menyewa, perusahaan melakukan metode pelelangan dengan mengumumkan di website bahwa perusahaan akan menyewa barang tersebut, kemudian mencari vendor yang akan disewa. Dikarenakan PT. Angkasa Pura I (Persero) mempunyai anak perusahaan, maka langsung membuat penunjukan pada PT Angkasa Pura *Support* sebagai penyedia barang. Dalam pencatatan sewa, PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pihak *Lessee* mencatat menurut PSAK No. 30 sewa operasi sebagai berikut:

1. Pencatatan Sewa Oleh *Lessee*

Beban Sewa Peralatan	xxx	
Beban Sewa Yang Masih Harus Dibayar		xxx

Jurnal seperti ini dibuat setiap bulan oleh perusahaan (beban akrual). untuk mengakui transaksi sewa sebagai beban sewa yang masih harus dibayar oleh perusahaan kepada vendor.

2. Pencatatan Saat Muncul Tagihan Vendor Oleh *Lessee*

Beban Yang Masih Harus Dibayar	xxx	
Hutang Vendor		xxx

Jurnal seperti ini dilakukan ketika vendor sebagai *Lessor* menerbitkan tagihan (*invoice*) kepada *Lessee*. Pada saat *Lessee* menerima tagihan, transaksi ini dengan sendirinya akan diakui sebagai utang perusahaan kepada vendor.

3. Pencatatan Saat *Lessee* Membayar Sewa

Hutang Vendor	xxx	
Kas/Bank		xxx

Jurnal seperti ini dicatat pada setiap akhir bulan ketika *Lessee* membayar biaya sewa kepada *Lessor* atas utang perusahaan berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh *Lessor*.

Hasil Penelitian

Pengakuan Sewa Operasi Menurut PSAK No. 30

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan. Dalam perlakuan akuntansi sewa, perusahaan ini masih menerapkan sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Berikut ini perlakuan akuntansi sewa operasi menurut PSAK No. 30:

1. Pencatatan Sewa Oleh *Lessee*

Beban Sewa	xxx	
Hutang		xxx

Jurnal ini dicatat ketika pihak *lessee* menyetujui kontrak sewa kepada *lessor*.

2. Pencatatan Saat *Lessee* Membayar Sewa

Hutang	xxx	
Kas/Bank		xxx

Jurnal ini dicatat ketika setiap akhir bulan ketika pihak *lessee* membayar sewa kepada *lessor* secara kredit.

Tabel 1 Perbandingan Pencatatan

No.	Perusahaan	PSAK No. 30	Kesimpulan
1.		Jurnal pencatatan sewa oleh <i>lessee</i>	
	Beban Sewa	Beban sewa peralatan	xxx
	Peralatan		xxx
	Beban yang masih Harus dibayar	Hutang	xxx
			xxx
2.		Jurnal saat muncul tagihan vendor oleh <i>lessee</i>	
	Beban yang Masih harus dibayar	Tidak ada jurnal	Belum sesuai
	Hutang vendor		xxx
			xxx
3.		Jurnal pengakuan dan pencatatan saat <i>lessee</i> membayar sewa	
	Hutang vendor	Hutang	xxx
	Kas/bank	Kas/bank	xxx
			xxx
			xxx

Sumber : Data Olahan, 2020

Tabel 1 menunjukkan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan PSAK No. 30 sebagai pembandingnya. Perusahaan secara umum telah mencatat sesuai dengan PSAK No. 30, akan tetapi hanya pengungkapannya saja yang perlu disesuaikan.

Perlakuan Akuntansi Sewa Pembiayaan Menurut PSAK No. 73

1. Pencatatan *Lessee* Saat Pengakuan Awal Sewa

Aset Hak Guna	xxx	
Liabilitas Sewa		xxx

Dalam jurnal ini perusahaan harus mengakui peralatan yang akan disewa sebagai aset hak guna pada liabilitas sewa. Yang kemudian harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan kontrak yang disetujui bersama. Sehubungan dengan ini pembayaran akan dilakukan per bulan.

2. Pencatatan *Lessee* Saat Membayar Bunga dan Cicilan Hutang Sewa

Liabilitas Sewa	xxx	
Beban Bunga		xxx
Kas/Bank		xxx

Dalam jurnal ini, perusahaan harus mengakui dan mencatat utang leasing dan beban bunga. Kemudian perusahaan harus membayar utang leasing dan beban bunga di akhir bulan pada *lessor*.

3. Pencatatan *Lessee* Saat Pengakuan Beban Depresiasi

Beban Depresiasi	xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

Dalam jurnal ini, perusahaan sudah harus melakukan penyusutan dengan mencatat beban depresiasi pada akumulasi depresiasi di akhir bulan.

Tabel 2 Perbandingan Pencatatan

No.	Perusahaan	PSAK No. 73	Kesimpulan
1.	Jurnal saat pengakuan awal sewa oleh <i>lessee</i>		
	Tidak ada jurnal	Aset hak guna xxx Liabilitas sewa xxx	Belum sesuai
2.	Jurnal saat membayar bunga dan cicilan hutang sewa guna oleh <i>lessee</i>		
	Tidak ada jurnal	Liabilitas sewa xxx Beban bunga xxx Kas/bank xxx	Belum sesuai
3.	Jurnal pengakuan dan pencatatan saat <i>lessee</i> membayar sewa		
	Tidak ada jurnal	Beban depresiasi xxx Akumulasi depresiasi xxx	Belum sesuai

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 2 menunjukkan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan PSAK No. 73 sebagai pembandingnya. Dapat dilihat Perusahaan masih menggunakan PSAK No. 30.

Pembahasan

Evaluasi Penerapan PSAK No. 30 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado

Penerapan akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado pada umumnya sudah sesuai dengan PSAK No. 30. PSAK No. 30 mengalami penyesuaian yang di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu PSAK No. 73 efektif 1 Januari 2020 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa. *IFRS 16* atau PSAK No. 73 mengubah pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa (*lessee*). Transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai sewa pembiayaan sehingga harus mencatat aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan dan mengakui beban sewa pada laporan laba rugi.

Dampak Penerapan Akuntansi Sewa Pembiayaan Menurut PSAK No. 73 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado

Dalam PSAK No. 73, penyewa diwajibkan untuk mencatat seluruh sewa, baik sewa pembiayaan maupun sewa operasi di laporan posisi keuangan penyewa, yang akan merefleksikan hak *lease* untuk memanfaatkan suatu aset selama masa manfaatnya. Hampir dapat dipastikan bahwa semua sewa masuk kategori sewa pembiayaan (*financial lease*) karena syarat untuk menjadi sewa operasi (*operational lease*) menjadi lebih spesifik yaitu jika memenuhi salah satu dari dua syarat berikut ini:

- Jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan)
- Sewa yang aset dasarnya (*underlying asset*) bernilai rendah.

Penerapan PSAK No. 73 juga berdampak signifikan pada penyewa. Dampak penerapan terlihat pada laporan posisi keuangan dan laba rugi penyewa. Berikut ini dampak dari kedua laporan tersebut:

- Dengan diakuiinya menjadi *financial lease* atau sewa pembiayaan, maka pihak penyewa atau *lessee* wajib untuk mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan (*on balancesheet*). Maka dampaknya adalah akan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK ini. Dengan terjadinya

peningkatan ini maka mengakibatkan peningkatan *debt to equity ratio*, artinya bahwa sumber keuangan perusahaan akan semakin besar dibiayai oleh utang.

2. Ketika perusahaan mengakui *financial lease* atau sewa pembiayaan maka laporan posisi keuangan bagian liabilitas perusahaan bertambah untuk akun hutang sewa guna. Pertambahan ini berdampak pada beban bunga.
3. Pada saat perusahaan mengakui *financial lease* maka pada laporan laba rugi tidak lagi mencatat beban sewa, karena barang yang di sewa sudah di akui sebagai aset perusahaan. Dengan diakui diakuinya sebagai aset perusahaan, maka perusahaan harus mengakui dan mencatat beban penyusutan.
4. Dengan diakuinya sebagai *financial lease*, maka pada setiap akhir periode akuntansi harus mencatat beban penyusutan pada laba rugi dan mengakumulasi penyusutan aset pada laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, laba tahun berjalan tidak mengalami perubahan yang signifikan karena sewa yang sebelumnya diakui sebagai beban sewa, dalam PSAK No. 73 akan hilang dan akan timbul beban bunga dan beban penyusutan.

PENUTUP

Kesimpulan

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan. Dalam perlakuan akuntansi sewa aset tetap, tentu setiap perusahaan harus mengikuti standar aturan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perbandingan penerapan perlakuan akuntansi sewa aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan, secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 30. Namun PSAK No. 30 akan di gantikan dengan PSAK No. 73: sewa efektif 1 Januari 2020. Dengan penghapusan PSAK No. 30, dan diterapkannya PSAK No. 73 maka akan memberikan dampak kepada perusahaan, diantaranya:

1. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sam Ratulangi Manado harus mengakui seluruh jenis sewa operasi *operating lease* menjadi sewa pembiayaan *financial lease*.
2. Dengan menerapkan PSAK No. 73 ini, maka akan menambah aset dan liabilitas perusahaan dimana otomatis akan menimbulkan beban bunga dan beban penyusutan pada laporan laba rugi.
3. Dengan menerapkan PSAK No. 73 ini, maka rasio utang terhadap modal meningkat yang kemudian memberikan gambaran laporan posisi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa di dalam PSAK No. 73 terdapat cukup banyak perubahan terutama dalam sisi penyewa *lessee*. Kemudian dikenalkan aset baru bernama aset hak guna (AHG). PSAK ini tidak hanya berlaku untuk transaksi sewa, namun juga untuk transaksi yang mengandung sewa. Sewa tidak lagi didefinisikan sebagai hak menggunakan aset, namun hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian dalam jangka waktu tertentu.

Saran

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dengan pembahasannya, maka peneliti menyarankan pada perusahaan agar:

1. Lebih teliti dalam menerapkan sewa aset tetap menurut PSAK No. 30, agar laporan keuangan akan memberikan gambaran yang sebenarnya.
2. Aturan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 seharusnya segera dipahami dan dilaksanakan oleh para *stakeholder*.
3. Perusahaan harus bisa mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan standar yang baru ini.
4. Implementasi dari PSAK No. 73 nanti harus dilakukan secara konsisten di kemudian hari untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Irwanto. 2019. *Implikasi Pajak Penerapan PSAK No. 73*. <https://www.thinktax.id/blog/implikasi-pajak-penerapan-psak-73> dan thinktax@gmail.com. Diakses, 07 Februari 2020 (09:34).

Giri, E. F. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Edisi 2. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Indonesia. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Draft Exposur (DE) PSAK No. 73 Tentang Sewa*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia 2017.

Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK No. 30 Tentang Sewa*. Edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK No. 16 Aset Tetap*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Accounting for Lease: Issues and Implementation*. http://iaiglobal.or.id/v03/PPL/email_ppl-606.html# dan registrasi@iaiglobal.or.id. Diakses, 19 Juli 2020 (13:12).

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lubis, Rahmat Hidayat. 2017. *Pengantar Akuntansi Jasa*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

Pangkerego, Revine Marni dan Budiarmo, N.S. 2015. "Penerapan PSAK No. 30 Tentang Perlakuan Akuntansi Sewa Aktiva Tetap Pada PT. Sinar Karya Mega Persada. *Jurnal Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 10 No 2. DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.10.2.8369.2015>. Diakses, 21 Juni 2020 (09:13).

